



Antisipasi 'Nuthuk' Saat Libur Lebaran

Sultan: Pedagang Wajib Pasang Daftar Harga

YOGYA (KR) - Kenyamanan wisatawan dan pemudik saat momentum libur lebaran menjadi dambaan. Salah satunya kenyamanan dalam berbelanja. Karena itu, para pedagang dilarang 'nuthuk' harga terhadap para wisatawan dan pemudik. Daftar harga wajib dipasang.

"Saya kira sudah tidak ada alasan lagi bagi pedagang di Malioboro untuk tidak memasang harga, apalagi sampai muncul istilah 'harga nuthuk'. Apalagi sekarang para pedagang sudah ditempatkan di Teras Malioboro. Jadi tidak ada alasan lagi, mereka tidak menyediakan daftar harga," kata Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X saat diminta tang-

gapan soal kesiapan Pemda DIY dalam menghadapi lonjakan pemudik atau wisatawan di Kompleks Kepatihan, Senin (18/4).

Sultan menyatakan, seharusnya para pedagang sudah sadar dan tidak perlu imbauan secara terus menerus karena sudah menjadi tanggungjawab bersama. Begitu pula dengan penegakkan Prokes, meski kasus harian sudah mulai melandai

harus tetap dilakukan.

"Seharusnya pedagang memahami dan sudah menyadari. 'Nek aku mengimbau terus, aku dikira juweh, mosok kesadaran bola bali harus diingatkan. Kalau terus menerus seperti itu tidak akan maju-maju," ungkap Sultan.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Ardyanto Setyo Ajie menyatakan terkait produk industri pariwisata intinya antara sosialisasi dan law enforcement-nya harus seimbang. Sebab tanpa keduanya maka permasalahan klasik yang viral seperti harga makanan dan parkir 'nuthuk' hingga wingko berjamur akan tetap terjadi alias

selalu berulang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Gubernur DIY guna mewujudkan pariwisata yang bertanggungjawab di DIY.

"Saya pikir ini menjadi momentum dengan arahan Pak Gubernur, semuanya kembali kepada ketegasan dan sosialisasi tentang standar produk bersamaan dengan law enforcement. Kedua sisi inilah yang seharusnya diupayakan bersama sehingga kualitas produk pariwisata akan terstandarkan dengan baik," papar Bobby kepada KR.

Bobby menjelaskan spirit mewujudkan Yogya sebagai destinasi wisata yang bertanggung

jawab ini harus benar-benar disadari dan dijalankan semua pihak, termasuk industri dan masyarakat itu sendiri. Kembali lagi ditegaskannya, pariwisata itu harus sustain, artinya tidak berpikir hanya kepentingan sesaat tetapi harus selalu berkembang.

"Jika DIY bisa menjadi tuan rumah yang bertanggungjawab, maka ini menjadi bagian dari spirit tersebut sehingga anak cucu kita kedepan bisa menikmati. Jangan aji mumpung lalu dimanfaatkan sekarang justru saya pikir akan menjadi hal yang negatif," tandasnya.

GIPI DIY mendukung penuh dan siap bersinergi dengan lintas sektor guna mewujudkan se-

mantang tersebut. Disamping itu, pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama-sama melalui sinergi lintas sektor. Dengan fungsi kontrol dan evaluasi yang dilakukan bersama-sama inilah akan melahirkan tanggung jawab bersama.

"Semua OPD terkait harus bersama menanggung permasalahan pariwisata yang ada di DIY, tidak dibebankan hanya kepada Dinas Pariwisata semata. Inilah yang selalu námakan bagaimana mewujudkan Yogya yang terintegrasi," imbuh Bobby. (Ria/Tra)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005